

ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL MALUKU DAN MALUKU UTARA

I. ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI MALUKU DAN MALUKU UTARA

Perkembangan indikator harga, Pendapatan dan Konsumsi. Di Provinsi Maluku Utara tingkat inflasi dipresentasikan oleh Kota Ternate sebesar 0,22% dan IHK sebesar 136,68% sedangkan nasional mengalami inflasi sebesar 1,3% dengan IHK 140,3%. Laju inflasi di Kota Ternate sampai Juni 2013 sebesar 1,32% dan inflasi y o y (Juni 2013 terhadap Juni 2012) sebesar 2,93%. Untuk laju inflasi tahun kalender Nasional sebesar 3,35% dan inflasi y o y sebesar 5,90%. Kinerja perekonomian di Maluku Utara digambarkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I _ 2013 sebesar 0,55%. Ini lebih lambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mencapai 0,94% (q to q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (y on y). PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan I- 2013 terjadi peningkatan sebesar 6,03%. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi 11,22% sedangkan Pertambangan dan Penggalan merupakan sector yang mengalami pertumbuhan paling rendah disusul sektpr Keuangan, Persewaan dan Jasa masing-masing 0,35% dan 0,68%. Faktor penggerak utama perekonomian pada triwulan I adalah persiapan pemilihan kepala daerah dan event pariwisata.

Koefisien Gini sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Data yang diperoleh Gini Rasio Maluku Utara tahun 2011 sebesar 0,3284%. Angka ini lebih baik dibandingkan gini rasio Nasional 0,400. Walaupun masih dalam kategori tingkat ketimpangan rendah dibawah 0,4% namun perlu dicermati bahwa koefisien gini tersebut terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 0,3195%.

Secara umum trend IPM di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2007 – 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan capaian yang masih relative rendah bila dibandingkan dengan nasional. Pertumbuhan IPM yang positif setiap tahunnya meskipun kenaikan belum signifikan perekonomian provinsi ini nampaknya berhasil memperpendek jalur kendali manajemen dan focus yang lebih baik yang memungkinkan pengelolaan pembangunan khususnya yang berorientasi pada pembangunan manusia lebih terkelola dengan baik bila dibandingkan dengan nasional status pembangunan manusia masih berada pada tingkat relative rendah. Sedangkan pada persebaran penduduk antara kab/kota yang masih timpang. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

II. ANALISIS PERKEMBANGAN FISKAL MALUKU UTARA

Terkait sumber penerimaan daerah dan kontribusi penduduk terhadap pendapatan daerah tercermin dari Rasio Pendapatan terhadap PDRB, yaitu Rasio Pajak, Rasio Bea Masuk dan Cukai dan Rasio PAD. Sesuai data yang diperoleh dan setelah dihitung diperoleh Rasio Pajak Tahun 2011 adalah 14,85% sedangkan Tahun 2012 sebesar 19,72% artinya tahun 2012 kontribusi peningkatan PDRB Provinsi Maluku Utara terhadap penerimaan pajak naik sebesar 4,87% dibandingkan dengan tahun 2011. Jika dibandingkan dengan target rasio pajak yang tercantum dalam RPJM 2010 – 2014, maka rasio pajak tahun 2012 diatas target nasional yaitu 13%. Peningkatan rasio pajak ini sebagai keberhasilan atas reformasi perpajakan yang menyebabkan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan rasio Bea Masuk dan Cukai tahun 2011 sebesar 0,09% dan tahun 2012 sebesar 0,08% artinya tahun 2012 kontribusi peningkatan PDRB terhadap penerimaan Bea Masuk dan Cukai turun sebesar 0,01% dibandingkan tahun 2011, hal ini disebabkan peningkatan penerimaan Bea Masuk dan Cukai yang tidak sebanding dengan peningkatan PDRB. Selanjutnya, Rasio PAD tahun 2011 sebesar 5,76% dan tahun 2012 sebesar 6,49%, artinya Tahun 2012 rasio PAD menurun 0,73% dibanding tahun 2011.

Rasio Pendapatan Perkapita

Rasio ini menggambarkan kontribusi penduduk terhadap pendapatan daerah. Ada tiga indikator yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Rasio Pajak per Kapita yang pada tahun 2011 sebesar Rp. 843.676,00 dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.255.272,00 artinya terdapat pertumbuhan penerimaan pajak meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Perkembangan pertumbuhan ini sangat baik dengan asumsi pertumbuhan penduduk disertai dengan pertumbuhan wajib pajak yang membayar pajak. Sedangkan Rasio Bea Masuk dan Cukai per Kapita untuk tahun 2011 sebesar Rp. 5.002,00 dan tahun 2012 sebesar 5.228,00, menunjukkan pertumbuhan penerimaan Bea Masuk dan Cukai lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, Rasio PAD per Kapita untuk tahun 2011 sebesar Rp. 327.067,00 sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 413.088,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2012.

Belanja Pusat dan Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang seberapa besar dana APBN berperan terhadap belanja daerah, seberapa besar porsi belanja tiap penduduk dan seberapa besar persentase belanja yang digunakan untuk pegawai serta belanja modal. Rasio Belanja APBN digunakan untuk membandingkan proporsi dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan belanja pada APBN. Rasio belanja APBN tahun 2012 sebesar 11,81% dan tahun 2013 sebesar 8,10%,

menunjukkan bahwa terjadi penurunan peran APBN terhadap belanja pemerintah daerah. Secara tidak langsung penurunan peran APBN terhadap belanja pemerintah daerah tahun 2013 dapat dikatakan sudah semakin mampu dalam menyelenggarakan kegiatan yang sebelumnya dibiayai dari porsi APBN. Hal ini sejalan dengan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Dana Transfer ke daerah. Sedangkan Rasio Total Belanja terhadap Populasi cenderung berfungsi sebagai perbandingan spasial antar wilayah untuk mendapatkan proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari APBD dengan populasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih adil terhadap besaran anggaran pada suatu wilayah. Rasio Total Belanja terhadap Populasi tahun 2012 sebesar Rp. 5.288.196,00 dan tahun 2013 sebesar Rp. 6.265.362,00 artinya setiap 1 orang penduduk dapat dibiayai menggunakan dana belanja pemerintah daerah sebesar Rp. 5.288.196,00 pada tahun 2012. Untuk tahun 2013 rasio total belanja terhadap populasi mencapai Rp. 6.265.362,00, menunjukkan bahwa setiap 1 orang penduduk dapat dibiayai ,menggunakan dana belanja pemerintah daerah sebesar Rp. 6.265.362,00 pada tahun 2013. Dari rasio total belanja terhadap populasi tahun 2012 dan 2013 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pertumbuhan populasi yang menunjukkan peningkatan kemampuan sumber daya keuangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Rasio Belanja Pegawai adalah untuk mengetahui seberapa besar proporsi APBD yang digunakan untuk membayar belanja pegawai. Rasio Belanja Pegawai 2012 sebesar 37,97% dan tahun 2013 sebesar 36,12%. Rasio ini menunjukkan semakin berkurangnya porsi APBD untuk membiayai Belanja Pegawai meskipun penurunannya masih relative kecil (1,85%), hal ini menggambarkan adanya upaya yang lebih baik dari pemerintah daerah dalam rangka efisiensi belanja operasional. Diharapkan porsi belanja pegawai dapat dioptimalkan untuk kegiatan lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk membandingkan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD yang merupakan motor pertumbuhan regional. Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat tahun 2012 sebesar 122,65% dan tahun 2013 sebesar 69,81%. Data tahun 2012 menunjukkan belanja pemerintah pusat lebih besar dari belanja pemerintah daerah , namun kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2013 dimana belanja modal pemerintah pusat lebih kecil dari belanja modal pemerintah daerah . Perlu diingat bahwa data pagu belanja modal APBN tahun 2013 merupakan pagu sampai dengan semester I tahun 2013 sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan pagu hingga akhir tahun 2013 yang akan mengakibatkan perubahan rasio belanja modal pemerintah pusat tahun 2013..Hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah Rasio Belanja Modal untuk mengetahui tingkat fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal yang tercermin dari proporsi alokasi belanja modal dari belanja pada APBD. Rasio Belanja Modal tahun 2012 sebesar 29,88% dan tahun 2013 sebesar

33,71%, hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah semakin meningkat.

Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah

Dalam bagian ini menyajikan analisis apakah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan investasi dan pembangunan di daerahnya, apakah daerah sudah benar-benar mandiri dengan PADnya atau terlalu banyak bergantung dengan dana transfer dari APBN. Ruang fiskal yaitu pendapatan dikurangi dana alokasi earmarked (DAK) dan belanja wajib, mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran Pemda tanpa mengganggu solvabilitas fiskal. Ruang Fiskal tahun 2012 sebesar Rp. 3.189.758.727.510,00 atau sebesar 57,60% dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.674.879.101.474,00 atau sebesar 56,86% dari total pendapatan. Angka ini meningkat dibanding tahun 2012 namun secara proporsional menurun. Proporsi ruang fiskal terhadap total pendapatan agregat APBD Nasional tahun 2013 sebesar 57,32% maka proporsi wilayah Maluku Utara lebih rendah sebesar 0,46%. Sedangkan Rasio Kemandirian Daerah, apabila rasio PAD lebih besar dari rasio dana transfer berarti semakin mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti tingkat ketergantungan tinggi. Rasio PAD terhadap Pendapatan tahun 2012 sebesar 8,11% dan tahun 2013 sebesar 6,76%. Terjadi penurunan rasio PAD terhadap pendapatan sebesar 1,45% yang menggambarkan semakin berkurangnya peran PAD dalam membiayai belanja daerah tahun 2013. Sedangkan Rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan tahun 2012 sebesar 87,72% dan tahun 2013 sebesar 89,23%. Naiknya rasio dana transfer terhadap pendapatan sebesar 1,51% menunjukkan semakin bertambahnya peran dana transfer dalam membiayai belanja daerah tahun 2013. Hal ini dapat digambarkan bahwa tahun 2013 tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah masih rendah atau tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Penurunan rasio PAD terhadap total pendapatan tahun 2013 menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih dalam upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Jika dibandingkan dengan agregat APBD Nasional tahun 2013, maka tingkat kemandirian daerah jauh dibawah tingkat kemandirian daerah secara nasional sebesar 20,68% untuk rasio PAD terhadap total pendapatan dan 63,24% untuk rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Rasio Belanja Sektoral

Dalam bagian ini menyajikan alokasi belanja daerah ke bidang-bidang tertentu, analisis ini menggambarkan prioritas yang dilakukan oleh Pemda pada bidang-bidang tertentu. Rasio ini juga menggambarkan apakah prioritas belanja akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Rasio Belanja Sektoral adalah Belanja Bidang Pelayanan Publik dan Birokrasi. Untuk

rasio belanja pelayanan Publik tahun 2011 sebesar 36,33%, semakin besar rasio semakin baik pelayanan publik dan birokrasi sedangkan rasio jumlah pegawai sebesar 94,28%, semakin kecil rasio semakin baik pelayanan untuk pegawai. Sedangkan Belanja Bidang Infrastruktur menggunakan pagu belanja APBD berdasarkan urusan. Rasio Belanja Infrastruktur tahun 2010 sebesar 18,55% dan tahun 2011 sebesar 19,37% dari total belanja. Belanja bidang Kesehatan menggunakan pagu belanja APBD. Rasio Belanja Kesehatan tahun 2010 sebesar 7,61% dan tahun 2011 sebesar 7,66%. Rasio Pertumbuhan Fasilitas Kesehatan tahun 2011 sebesar 258%. Penambahan anggaran belanja kesehatan tahun 2011 sebesar 30,15% dari tahun 2010 berdampak pada pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan tahun 2011 sebesar 11,64% sedangkan Rasio Pertumbuhan Tenaga Medis tahun 2011 sebesar 207%, penambahan anggaran belanja kesehatan tahun 2011 sebesar 30,15% dari tahun 2010 berdampak pada pertumbuhan jumlah tenaga medis tahun 2011 sebesar 14,55%. Dari kedua rasio diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2011 pertumbuhan belanja kesehatan lebih banyak dipergunakan untuk menambah jumlah tenaga medis daripada jumlah fasilitas kesehatan. Belanja bidang Pendidikan juga menggunakan pagu belanja APBD. Untuk rasio bidang pendidikan tahun 2010 sebesar 14,29% dan tahun 2011 sebesar 17,15%, menunjukkan bahwa Pemda belum melaksanakan amanat UUD 1945 yaitu pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Tahun 2010 hanya Pemerintah Kota Ternate dan Kota Tidore adalah kepulauan yang telah memenuhi ketentuan tersebut dan pada tahun 2011 ditambah dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan Rasio Pertumbuhan Partisipasi Sekolah tahun 2011 -90,75%. Berdasarkan rasio, kenaikan atau pertumbuhan belanja pendidikan sebesar 37,21% tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah. Bahkan angka partisipasi sekolah pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,41%. Rasio Pertumbuhan Jumlah Guru tahun 2011 sebesar 11,20%, berdasarkan pertumbuhan belanja pendidikan sebesar 37,21% dapat meningkatkan jumlah guru sebesar 3,30% atau dengan pertumbuhan jumlah guru sebesar 11,20. Rasio pertumbuhan jumlah sekolah tahun 2011 sebesar 3,09% dengan pertumbuhan belanja pendidikan sebesar 37,21% dapat meningkatkan jumlah sekolah sebesar 11,97% atau dengan rasio pertumbuhan jumlah sekolah sebesar 3,09%, sedangkan rasio penurunan buta huruf tahun 2011 sebesar 465,12%, dengan demikian tahun 2011 untuk wilayah Maluku Utara pertumbuhan belanja pendidikan lebih difokuskan pada penambahan jumlah sekolah. Selanjutnya, Belanja Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan menggunakan pagu belanja APBD tahun 2010 sebesar 1,16% dan tahun 2011 sebesar 1,41% sedangkan Rasio Pertumbuhan HDI sebesar 61,06% dengan pertumbuhan belanja pendidikan sebesar 38,92% dapat meningkatkan pertumbuhan HDI sebesar 0,64%.

Perkembangan Surplus/deficit APBD terhadap pendapatan wilayah sebesar -3,76%, tanda negative menunjukkan bahwa tahun 2013 terjadi deficit APBD secara agregat jika dibandingkan dengan agregat APBC Nasional tahun 2012 maka rata-rata deficit lebih baik dari defisit agregat APBD Nasional yang angkanya mencapai 7,00%. Sedangkan perkembangan pinjaman daerah untuk membiayai defisit APBD, rasionya sebesar 33,36% untuk kab. Halmahera Tengah, Rasio Pinjaman Kota Ternate tahun 2012 sebesar 100%, sedangkan untuk Kab. Halmahera Selatan sebesar 95,24%. Ketiga Kab. Yang menggunakan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan sementara pemerintah lainnya di wilayah Maluku Utara lebih menggunakan SILPA tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagai sumber pembiayaan guna membiayai defisit APBD. Selanjutnya, Rasio Keseimbangan Primer tahun 2012 sebesar -3,90%. Negatif menunjukkan bahwa masih diperlukan tambahan pembiayaan untuk menutupi defisit APBD yang telah ditetapkan.

III. ANALISIS PERKEMBANGAN FISKAL MALUKU

Pendapatan pajak merupakan penyumbang paling besar terhadap PDRB Provinsi Maluku, Jika dibandingkan dengan target rasio pajak yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 adalah 13%, maka rasio pajak Provinsi Maluku untuk tahun 2013 berada di atas target nasional. Peningkatan ini dapat di artikan sebagai hasil reformasi perpajakan, peningkatan kesadaran wajib pajak dan pertambahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pada sisi yang lain, rasio pendapatan asli daerah hanya berada di bawah angka 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD belum mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah Maluku. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai masih terbuka kemungkinan luas untuk mengeksplorasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan target rasio pajak yang tercantum dalam RPJM 2010-2014 adalah 13%, maka rasio Pajak Prov. Maluku untuk tahun 2013 di atas target nasional. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai hasil reformasi perpajakan, peningkatan kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya, dan pertumbuhan WP.

Pendapatan pajak masih merupakan sumber penerimaan yang paling dominan, dengan besaran hampir 13 kali PAD Provinsi Maluku, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bea Cukai.

Idealnya angka-angka ini dibandingkan dalam beberapa tahun untuk mengetahui perkembangan/trend, namun data-data tersebut tidak dapat diperoleh secara lengkap, sehingga menyulitkan untuk melakukan analisis lanjutan yang lebih mendalam.

Sedangkan Rasio Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dalam bentuk belanja DK, TP dan UB terhadap belanja total daerah hanya sebesar 9,38%. Data lengkap semua komponen sampai tahun 2012 tidak diperoleh.

Dilain sisi terjadi penurunan peran APBN terhadap belanja pemerintah daerah, secara tidak langsung hal ini dianggap bahwa daerah sudah semakin mampu dalam menyelenggarakan kegiatan yang sebelumnya dibiayai dari porsi APBN. Hal ini sejalan dengan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dalam dana transfer daerah.

Rasio Total Belanja terhadap Populasi

Dengan menggunakan data belanja pusat dan belanja daerah, terlihat bahwa rasio total belanja terhadap populasi untuk APBD lebih besar dari rasio yang sama apabila menggunakan dana APBN. Realitas ini dapat dipahami sebagai penjelasan dari hal sebelumnya. Dengan porsi pembiayaan APBN yang semakin berkurang terhadap pembangunan daerah, yang dialihkan ke transfer daerah (APBD) hal ini memberi dampak kepada penduduk.

Untuk tahun 2013 rasio total belanja terhadap populasi untuk wilayah Provinsi Maluku mencapai angka 7.358.092. angka ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang penduduk dapat dibiayai dengan menggunakan dana belanja pemerintah daerah sebesar 474. Sebuah angka yang masih sangat kecil untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk Maluku.

Rasio Belanja Pegawai

Porsi APBD yang dipergunakan untuk keperluan belanja pegawai untuk tahun 2013 adalah sebesar 25,3%. Data lengkap semua komponen sampai tahun 2012 tidak diperoleh.

Rasio ini menunjukkan tahun 2013 porsi APBD hanya 25,3%. Diharapkan porsi kelebihan pegawai tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja operasional.

Rasio Belanja Modal Pemerintah Pusat

Perbandingan besaran belanja daerah untuk keperluan belanja modal dengan besaran belanja pusat untuk keperluan belanja modal di Provinsi Maluku pada tahun 2011. Porsi belanja modal daerah terhadap belanja modal pusat hanya sebesar 7,04%. Data lengkap semua komponen sampai tahun 2012 tidak diperoleh.

Data tahun 2013, di mana belanja modal Pemerintah Pusat lebih besar dari belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Maluku, perlu diingat bahwa data pagu belanja modal APBN menunjukkan pagu sampai semester I sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan pagu hingga akhir tahun 2013 yang akan mengakibatkan perubahan rasio belanja modal Pemerintah Daerah tahun 2013.

Rasio belanja modal, rasio ini untuk mengetahui tingkat fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal, yang tercermin dari proporsi alokasi belanja modal dari belanja pada APBD. Porsi belanja modal daerah hanya sebesar 2,1% terhadap total belanja daerah. Data lengkap semua komponen sampai tahun 2012 tidak diperoleh.

Untuk tahun 2013, rasio belanja modal untuk Provinsi Maluku hanya 2,1% terhadap total belanja APBD. Dari angk tersebut dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku melakukan pembangunan belum maksimal, dibutuhkan kerja keras dan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dengan menggunakan dana-dana yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ruang Fiskal dan Kemandirian Daerah

Ruang fiskal mencerminkan ketersediaan anggaran pemerintah daerah tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai belanja wajib). Pembangunan daerah idealnya memiliki sumber pendanaan yang memadai dan berkesinambungan. Ruang fiskal yang dimiliki oleh Provinsi Maluku cukup besar yaitu 70,84% dari total pagu APBD. Pembangunan daerah idealnya memiliki sumber pendanaan yang memadai. Ruang Fiskal Provinsi Maluku tahun 2013 sebesar 70,84% jika dibandingkan dengan total pendapatan agregat APBB normal tahun 2013, sebesar 57,32%, maka proporsi wilayah Maluku lebih tinggi 13,52%, artinya Pemerintah Daerah mempunyai kesulitan terkait penyerapan dana yang lebih besar.

Rasio Kemandirian Daerah

Porsi PAD dan porsi Dana Transfer terhadap pendapatan daerah adalah berturut-turut sebesar 6,5% dan 83%. Sisa pendapatan sebesar 10,5% diperoleh dari Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Data lengkap semua komponen sampai tahun 2012 tidak diperoleh.

Dari hasil perhitungan, ternyata rasio dana transfer lebih besar (83,8%) dari rasio PAD (6,5%). Ini berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah masih jauh dari mandiri karena ketergantungan kepada Pemerintah Pusat sangat besar, untuk membiayai belanja daerah untuk tahun 2013.

Rasio Belanja Sektoral

Belanja Bidang pelayanan publik dan birokrasi. Data yang dibutuhkan untuk menghitung rasio ini tidak diperoleh. Rasio belanja infrastruktur Provinsi Maluku untuk tahun 2009 adalah sebesar 12,75%, mencerminkan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembangunan infrastruktur. Porsi ini dua kali lebih kecil dari porsi belanja pegawai untuk pemerintah Provinsi Maluku. Data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan Rasio Belanja Pemeliharaan Jalan dan Rasio Pertumbuhan Jalan sampai dengan tahun 2013 tidak diperoleh.

Tahun 2013 porsi belanja kesehatan dari pagu belanja pemerintah Provinsi Maluku adalah sebesar 7,87%. Porsi ini lebih besar apabila dibandingkan dengan porsi belanja kesehatan APBN-P 2013 sebesar 5%.

Data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan Rasio Pertumbuhan Fasilitas Kesehatan dan Rasio Pertumbuhan Tenaga Medis tidak diperoleh.

Belanja Bidang Pendidikan

Porsi belanja pendidikan terhadap pagu belanja daerah adalah sekitar 25%. Porsi ini melebihi porsi ideal belanja pendidikan nasional yang menunjuk angka 20%. Data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan Rasio Pertumbuhan Partisipasi Sekolah, Rasio Pertumbuhan Jumlah Guru, Rasio Pertumbuhan Jumlah Sekolah dan Rasio Penurunan Buta Huruf tidak diperoleh.

Belanja Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan

Data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan Rasio Belanja Kesejahteraan, Rasio Pertumbuhan HDI, Rasio Penurunan Penduduk Miskin, dan Rasio Rasio Penurunan Angka Kematian Bayi tidak dapat diperoleh.

Belanja Bidang Pertanian

Data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan Rasio Belanja Pertanian, Rasio Pertumbuhan NTP, Rasio Peningkatan Produksi dan Rasio Subsidi Pertanian tidak diperoleh.

SILPA dan Pembiayaan

Bagian ini menyajikan analisis mengenai tingkat surplus/defisit, serta bagaimana daerah mengatur strategi untuk menutup defisit tersebut.

Perkembangan surplus/defisit APB

Sampai saat ini defisit Provinsi Maluku mencapai 3,03%. Jumlah defisit ini menjadi insentif bagi pihak Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan sesuai tujuan awal.

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB.

Persentase defisit terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2013 mencapai 7,57%. Supaya kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan awal, dibutuhkan pembiayaan untuk menutupi defisit ini.

Rasio SILPA terhadap alokasi belanja

Rasio SILPA terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah mencapai 5,64%. Jumlah nominal SILPA sebesar Rp458 milyar mencerminkan ketidakefisiensian pengelola keuangan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku, terlebih apabila dibandingkan dengan jumlah nominal defisit sebesar Rp239 milyar.

Perkembangan pembiayaan

Rasio pinjaman daerah terhadap total pembiayaan. Data lengkap yang dibutuhkan untuk perhitungan Rasio Pinjaman Daerah tidak diperoleh.

Rasio keseimbangan primer

Jumlah total belanja lebih besar daripada jumlah total pendapatan. Besaran keseimbangan primer terukur adalah -1,03. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku mulai mengalami kesulitan untuk membiayai defisit yang muncul, yang sebagian diakibatkan oleh penerimaan pajak yang belum optimal.